



**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

Nada Melinda¹, Dinal Eka Pertiwi², Nensi Yuniarti Zs³, Furqonti Ranidiah⁴
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3,4}

nadamelinda26@gmail.com¹, dinalekaptiwi@umb.ac.id¹, nensiyuniarti@umb.ac.id³,
furqontiranidiah@umb.ac.id⁴

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 04/05/2026
Direvisi : 15/05/2026
Disetujui: 21/05/2026

Kata Kunci:

Anggaran, Efektivitas,
Efisiensi, Kinerja Keuangan,
Value for Money

Keywords:

*Budget, Effectiveness,
Efficiency, Financial
Performance, Value for Money*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Empat Lawang menggunakan pendekatan Value for Money yang ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan pengukuran Value for Money berdasarkan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, kinerja anggaran berada pada kategori ekonomis selama periode 2022–2024 dengan rasio masing-masing sebesar 105,54%, 200,63%, dan 168,43%. Dari aspek efisiensi, kinerja anggaran menunjukkan kategori sangat efisien pada tahun 2022 (84,22%), efisien pada tahun 2023 (91,26%), namun menjadi tidak efisien pada tahun 2024 (129,40%) akibat adanya refocusing anggaran. Sementara itu, dari aspek efektivitas, kinerja anggaran berada pada kategori cukup efektif selama tiga tahun berturut-turut dengan rasio 98,82%, 89,37%, dan 87,12%, meskipun mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang secara umum telah memenuhi prinsip Value for Money terutama pada aspek ekonomi dan efektivitas, namun aspek efisiensi masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan anggaran dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

ABSTRACT :

This study aims to analyze the budget performance of the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Empat Lawang Regency using the Value for Money approach reviewed from the economic, efficiency, and effectiveness aspects. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach using secondary data sourced from the Budget Realization Report (LRA) and the Physical and Financial



Realization Report of the PUPR Department of Empat Lawang Regency for the 2022–2024 Fiscal Year. Data collection techniques were carried out through documentation and literature studies, while data analysis used Value for Money measurements based on economic, efficiency, and effectiveness ratios. The results of the study indicate that from an economic aspect, budget performance is in the economic category during the 2022–2024 period with ratios of 105.54%, 200.63%, and 168.43%, respectively. From the efficiency aspect, budget performance shows a very efficient category in 2022 (84.22%), efficient in 2023 (91.26%), but becomes inefficient in 2024 (129.40%) due to budget refocusing. Meanwhile, from the effectiveness aspect, budget performance is in the fairly effective category for three consecutive years with a ratio of 98.82%, 89.37%, and 87.12%, although experiencing a downward trend every year. The conclusion of this study shows that the budget performance of the PUPR Office of Empat Lawang Regency has generally met the Value for Money principle, especially in the economic and effectiveness aspects, but the efficiency aspect still needs to be improved so that budget management can produce more optimal performance and provide greater benefits to the community.

PENDAHULUAN

Value for money adalah prinsip pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh hasil terbaik dari setiap penggunaan anggaran melalui penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (OECD, 2020). Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan organisasi memperoleh input dengan biaya yang paling rendah tanpa mengurangi kualitas, sedangkan efisiensi menekankan hubungan antara penggunaan sumber daya dengan output yang dihasilkan. Adapun efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2021). Penerapan Value for Money dalam pengelolaan anggaran sektor publik semakin mendapat perhatian sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 2017). Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (LAN RI, 2022).

Salah satu tujuan penerapan Value for Money adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2023). Selain itu, penerapan konsep ini mendorong organisasi sektor publik untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik (BPK RI, 2022). Dalam praktiknya, evaluasi kinerja tidak hanya berorientasi pada besarnya output yang dihasilkan, tetapi juga pada outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan publik (World Bank, 2019). Oleh karena itu, setiap organisasi pemerintah dituntut mampu menyusun program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif.

Objek penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki



tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Besarnya anggaran yang dikelola menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). Evaluasi terhadap kinerja anggaran menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Bappenas, 2020).

KAJIAN TEORI

Value for Money

Value for money (VFM) adalah konsep yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran publik memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan fokus pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terkhusus untuk organisasi di sektor publik. Menurut (Mardiasmo, 2009), *VFM* mengedepankan penggunaan input yang minimal untuk mencapai hasil yang sesuai harapan, sehingga penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini dalam setiap program dan kebijakan. Mardiasmo (2009) menyebutkan pembagian indikator-indikator dalam konsep *Value for money* menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya. Dalam indikator ini usaha mendapatkan barang dan ataupun jasa pada harga terbaik untuk hasil yang terbaik juga disebut ekonomis. Sedangkan suatu hasil/output yang dicapai dengan sumber daya seminimal mungkin disebut efisiensi.
2. Indikator kualitas pelayanan sebagai cerminan dari peran output hasil/keluaran dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran Ekonomi yang dinyatakan Mardiasmo (2002:133), berfokus pada input sumber daya yang digunakan. Menurut Mahsun (2006:179) ekonomis juga dapat disimpulkan sebagai suatu penghindaran dari pemborosan. Pengukuran tingkat ekonomi yang dilakukan menggunakan data anggaran dan realisasi yang dikeluarkan. Ekonomisnya kinerja suatu organisasi bisa dilihat dari target anggaran yang harus lebih besar dari realiasi sebenarnya. Menurut Mohamad Mahsun (2013:188) tingkat ekonomi dihitung dengan melibatkan komponen anggaran belanja dan realisasi belanja sebenarnya. Berikut rumus pengukuran kriteria ekonomis.

Tabel 1.
Kriteria Ekonomis

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Ekonomi	$\frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$	>100%	Ekonomis
		85-100%	Cukup Ekonomis
		65-84%	Kurang Ekonomis
		65%	Tidak Ekonomis

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015



Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009:133) Pengukuran efisiensi dengan menggunakan perbandingan antara *Output*/keluaran dengan *Input*/sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun dalam batas normal. Jika suatu organisasi menggunakan input sumber daya yang minimal dan dapat mencapai hasil sesuai dengan target maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi yang dihasilkan. Proses kegiatan dikatakan efisien ketika jika suatu hasil kerja diwujudkan melalui sumber inout yang minimal mungkin.

Tabel 2.
Kriteria Efisiensi

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efisiensi	$\frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$	<90%	Sangat Efisien
		90-99%	Efisien
		100%	Cukup Efisien
		>100%	Tidak Efisien

Sumber:(Mahmudi, 2007) *Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi,2015*

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan. Pada umumnya, Efektivitas menilai suatu kegiatan telah mencapai targetnya. Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektivitas menyebutkan relasi antara output/keluaran dengan tujuan atau target.

Tabel 3.
Kriteria Efektivitas

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efektivitas	$\frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$	$\geq 100\%$	Efektif
		85-99%	Cukup Efektif
		65-84%	Kurang Efektif
		$\geq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber:(Mahmudi, 2007) *Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi,2015*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan Jenis sekunder. Penelitian ini berfokus pada analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan prinsip *Value for money* pada Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022-2024. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (E-Laporan) Dinas PUPR



Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022-2024 Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang. Objek dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun anggaran 2022-2024. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Dokumentasi

Analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024.

2. Studi Pustaka

Menggunakan artikel, penelitian terdahulu, dan buku

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan deskriptif dan uraian penjelasan pengukuran kinerja atas penerapan *Value for money* (VFM) Dinas PUPR di Kabupaten Empat Lawang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Pengukuran *Value for money*

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomis memiliki arti dimana dalam pengadaan sumber daya, lebih baik menetapkan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Jika realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran maka kinerja suatu organisasi tersebut dapat dikatakan ekonomis. Semakin besar rasio ekonomis yang dapat diprediksi oleh pemerintah tentang biaya pengeluaran, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ekonomis dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.
Rumus dan Kriteria Pengukuran Ekonomis

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Ekonomis	$\frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$	>100%	Ekonomis
		85-100%	Cukup Ekonomis
		65-84%	Kurang Ekonomis
		65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015

Dengan rumus pengukuran diatas yang diterapkan pada Laporan Realisasi anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut,

Tabel 5.
**Hasil Persentase Pengukuran Ekonomi Dinas PUPR
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Nilai Kinerja	Keterangan
2022	Rp 384.594.304.216	Rp 364.412.944.277	105,54	Ekonomis



2023	Rp 423.638.855.563	Rp 211.152.329.666	200,63	Ekonomis
2024	Rp 496.315.880.894	Rp 294.665.348.265	168,43	Ekonomis

Berdasarkan tabel 5 hasil pengukuran rasio ekonomi yang telah dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang mengalami fluktuasi hal ini tentu juga sejalan dan berkaitan dengan realisasi anggaran yang didapatkan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024 jika dihitung menggunakan pengukuran ekonomi hasilnya yaitu ekonomis karena persentase penilaian kinerjanya berada >100% yaitu 105,54% pada tahun 2022, 200,63% pada tahun 2023 dan 168,43% untuk tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Kriteria dalam Mahmudi (2015) Jika persentase ekonomis >100% maka ekonomis.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan atau pemanfaatan *Input* tertentu untuk mencapai hasil yang maksimum dalam proses pelaksanaan suatu program kerja. Proses operasional menjadi efisien ketika suatu target dapat dicapai dengan sumber daya dan sarana yang serendah mungkin tetapi masih dalam kewajaran. Semakin kecil nilai efisiensinya, semakin baik. Pengukuran tingkat efisiensi dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6.
Rumus dan Kriteria Pengukuran Efisiensi

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efisiensi	$\frac{\text{Nilai Kinerja Output} \times 100\%}{\text{Nilai Kinerja Input}}$	<90%	Sangat Efisien
		90-99%	Efisien
		100%	Cukup Efisien
		>100%	Tidak Efisien

Dengan menggunakan rumus pengukuran diatas yang diterapkan pada Laporan Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut

Tabel 7.
**Hasil Persentase Pengukuran Efisiensi Dinas PUPR
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024**

Kinerja %		Efisiensi	Keterangan
2022	<i>Input</i>	109,34	Sangat Efisien
	<i>Output</i>	92,09	
	<i>Outcome</i>	91,00	
2023	<i>Input</i>	91,00	Efisien
	<i>Output</i>	83,04	
	<i>Outcome</i>	74,22	



2024	<i>Input</i>	63,81	129,40	Tidak Efisien
	<i>Output</i>	82,58		
	<i>Outcome</i>	71,94		

Pada tabel dengan menggunakan pengukuran efisiensi dapat dikatakan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang cukup baik, pada tahun 2022 hasilnya sangat efisien karena persentasenya berada pada angka 84,22%, pada tahun 2023 Efisien karena persentasenya berada pada 91,26 % walaupun pada tahun 2024 hasilnya tidak efisien yaitu 129,40%. Menurut Kasubbag Perencanaan dan keuangan, pada tahun 2024 terjadi beberapa factor yang menyebabkan anggaran menjadi tidak efisien seperti halnya adanya refocusing anggaran secara masif sebanyak dua kali pada Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang.

c. Pengukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas sebagai *Output* dari organisasi terhadap target-target pendapatan sektor publik, dan efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan. Pada umumnya, Efektivitas menilai suatu kegiatan telah mencapai targetnya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 8.
Rumus dan Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efektivitas	$\frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$	$\geq 100\%$	Efektif
		85-99%	Cukup Efektif
		65-84%	Kurang Efektif
		$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Tabel 9.
**Hasil Persentase Pengukuran Efektivitas Dinas PUPR
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024**

Kinerja		Efektivitas	Keterangan
2022	<i>Input</i>	109,34	98,82 Cukup Efektif
	<i>Output</i>	92,09	
	<i>Outcome</i>	91,00	
2023	<i>Input</i>	91,00	89,37 Cukup Efektif
	<i>Output</i>	83,04	
	<i>Outcome</i>	74,22	
2024	<i>Input</i>	63,81	87,12 Cukup Efektif
	<i>Output</i>	82,58	
	<i>Outcome</i>	71,94	

Pada tabel 9 pengukuran efektivitas selama 3 tahun yaitu Tahun 2022-2024 dapat dikatakan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang cukup baik yaitu hasilnya berada pada



tingkat Cukup Efektif. Namun, hal ini tentu harus menjadi perhatian penting bagi dinas terkait karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan tingkat efektivitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Tingkat Efektivitas nya berada pada 98,82%, pada tahun 2023 turun menjadi 89,37% dan berlanjut lagi pada tahun 2024 turun menjadi 87,12%.

Tabel 10.
Hasil Pengukuran Value for money dalam pengukuran kinerja anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024

Tahun	Ekonomis		Efisiensi		Efektivitas	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2022	105,54	Ekonomis	84,22	Sangat Efisien	98,82	Cukup Eefktif
2023	200,63	Ekonomis	91,26	Efisien	89,37	Cukup Eefktif
2024	168,43	Ekonomis	129,40	Tidak Efisien	87,12	Cukup Eefktif

Berdasarkan tabel mengenai Hasil Pengukuran *Value for money* dalam pengukuran kinerja anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024, Ekonomi dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan sumber daya dalam hal ini anggaran yang telah ditekankan dalam mencapai *Input*. Segi ekonomi bertujuan untuk memperoleh sumber daya tertentu dengan harga seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil dengan kualitas yang terbaik. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024 jika dihitung menggunakan pengukuran ekonomi hasilnya yaitu ekonomis karena persentase penilaian kinerja nya berada >100% yaitu 105,54% pada tahun 2022, 200,63% pada tahun 2023 dan 168,43% untuk tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Kriteria dalam Mahmudi (2015) Jika persentase ekonomis >100% maka ekonomis. Namun perlu diingat bahwa semakin besar nilai ekonomisnya belum tentu bisa menjamin bahwa nantinya tingkat efisien dan efektivitas nya berjalan dengan nilai yang sama. Hal ini tentu harus menjadi acuan untuk Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

Efisiensi sangatlah erat kaitannya dengan produktivitas. Efisiensinya suatu anggaran jika suatu kegiatan program tertentu dapat mencapai hasil yang diharapkan melalui sumber daya seminimal mungkin. Jika hasil/keluaran yang dicapai lebih besar nilainya dari pada sumber daya input yang digunakan maka semakin tinggi juga tingkat efisiensinya. Pada tabel dengan menggunakan pengukuran efisiensi dapat dikatakan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang cukup baik, pada tahun 2022 hasilnya sangat efisien karena persentasenya berada pada angka 84,22%, pada tahun 2023 Efisien karena persentasenya berada pada 91,26 % walaupun pada tahun 2024 hasilnya tidak efisien yaitu 129,40%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Efisiensi Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini tentu harus menjadi fokus Instansi agar dapat meningkatkan kinerjanya agar menjadi efisien setiap tahunnya mengingat bahwa pengukuran efisiensi diambil dari hasil capaian kinerja dan persentase anggaran yang telah dipakai setiap tahunnya. Pada hasil pengukuran efektivitas selama 3 tahun yaitu Tahun 2022-2024 dapat dikatakan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang cukup baik dan berada pada tingkat Cukup Efektif. Namun, hal ini tentu harus menjadi perhatian penting karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan tingkat efektivitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Tingkat Efektivitas nya berada pada 98,82%, pada tahun 2023 turun menjadi 89,37% dan berlanjut lagi pada tahun



2024 turun menjadi 87,12%. Walaupun berada pada tingkat cukup efektif Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang akan bisa meningkatkan kinerja jika didukung oleh *Output* dan *Outcome* yang baik setiap tahunnya.

SIMPULAN

Bahwa Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang cukup optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2024 berada pada kategori ekonomis karena berada pada presentase lebih dari 100%, sehingga dapat dikatakan Dinas PUPR semakin baik dalam melakukan penghematan dengan kata lain meminimalisir sumber daya *Input* berupa anggaran untuk mencapai kegiatan. Dalam segi efisiensi pada tahun 2022 sangat efisien dan di tahun 2023 efisien namun tahun 2024 diperoleh hasil lebih dari 100% yang dikatakan tidak efisien karena belum bisa menimalkan pengeluaran sesuai masukan yang diterima sehingga realisasi *Input* lebih tinggi dari realisasi *Output*, Tetapi Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang terus berupaya dalam memperbaiki kinerjanya. Kinerja anggaran Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang dari segi efektivitas dari tahun 2022-2024 menunjukkan hasil yang sama yaitu berada pada tingkat cukup efektif hal ini tentu menjadi keberhasilan Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. BPKP.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2022. <https://www.bpk.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kajian Fiskal Regional Tahun 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAN RI.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Government at a Glance 2021. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en> (OECD)
- United Nations Development Programme. (2017). Governance for Sustainable Development. UNDP.
- World Bank. (2019). Improving Public Sector Performance. World Bank.